



MUHAMMADIYAH DAN ISU-ISU STRATEGIS KEUMATAN, KEBANGSAAN, DAN KEMANUSIAAN UNIVERSAL

**Disampaikan pada
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47
MAKASSAR
16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M**

DAFTAR ISI

MUHAMMADIYAH DAN ISU-ISU STRATEGIS KEUMATAN, KEBANGSAAN, DAN KEMANUSIAAN UNIVERSAL	1
A. ISU-ISU KEUMATAN	1
1. Keberagamaan Yang Moderat	1
2. Membangun Dialog Sunni-Syiah	2
3. Substansialisasi Agama.....	3
5. Membangun Budaya Hidup Bersih.....	5
B. ISU-ISU KEBANGSAAN	6
1. Keberagamaan Yang Toleran	6
2. Melayani dan Memberdayakan Kelompok Difabel	7
3. Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana.....	8
4. Membangun Budaya Egalitarian dan Sistem Meritokrasi.....	9
5. Mengatasi Krisis Air dan Energi.....	10
6. Memaksimalkan Bonus Demografi	11
7. Membangun Masyarakat Ilmu	12
8. Menyelamatkan Negara Dengan Jihad Konstitusi .	13
C. ISU-ISU KEMANUSIAAN UNIVERSAL.....	14
1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	14
2. Perlindungan Kelompok Minoritas.....	15
3. Eksistensi Manusia di Bumi	16
4. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi.....	17
5. Mengatasi Masalah Pengungsi.....	17

MUHAMMADIYAH DAN ISU-ISU STRATEGIS KEUMATAN, KEBANGSAAN, DAN KEMANUSIAAN UNIVERSAL

Bismillahirrahmanirrahim

Muhammadiyah senantiasa bergerak dalam lingkungan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan universal yang sarat dinamika, masalah, dan tantangan aktual yang kompleks dengan keniscayaan melakukan ikhtiar mencermati, mengantisipasi, dan memberikan solusi strategis dalam bingkai Islam berkemajuan menuju pencerahan peradaban.

Melalui Mukhtamar ke-47 tanggal 18-22 Syawwal 1436 H bertepatan 1-7 Agustus 2015 M di Makassar, setelah mencermati perkembangan aktual dalam berbagai ranah kehidupan maka Muhammadiyah menyampaikan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal sebagai berikut:

A. ISU-ISU KEUMATAN

1. Keberagaman Yang Moderat

Perkembangan mutakhir menunjukkan gejala meningkatnya perilaku keberagaman yang ekstrim antara lain kecenderungan mengkafirkan pihak lain (*takfiri*). Di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tuduhan sesat, kafir, dan liberal. Kecenderungan *takfiri* bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan,

tawasuth, dan toleransi. Sikap mudah mengkafirkan pihak lain disebabkan oleh banyak faktor antara lain cara pandang keagamaan yang sempit, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, pendidikan agama yang eksklusif, politisasi agama, serta pengaruh konflik politik dan keagamaan dari luar negeri, terutama yang terjadi di Timur Tengah.

Mencermati potensi destruktif yang ditimbulkan oleh kelompok *takfiri*, Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga Persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok *takfiri* melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interkasi sosial yang santun. Muhammadiyah memandang berbagai perbedaan dan keragaman sebagai sunnatullah, rahmat, dan khazanah intelektual yang dapat memperkaya pemikiran dan memperluas wawasan yang mendorong kemajuan. Persatuan bukanlah kesatuan dan penyeragaman tetapi sinergi, saling menghormati dan bekerjasama dengan ikatan iman, semangat *ukhuwah*, *tasamuh*, dan *fastabiq al-khairat*. Dalam kehidupan masyarakat dan kebangsaan yang terbuka, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengembangkan sikap beragama yang tengahan (*wasithiyah*, moderat), saling mendukung dan memperkuat, serta tidak saling memperlemah dan meniadakan kelompok lain yang berbeda.

2. Membangun Dialog Sunni-Syiah

Akhir-akhir ini energi umat tersedot dalam persoalan pertentangan antara pengikut kelompok Sunni dengan Syiah. Walaupun masih dalam skala yang relatif kecil dan lokal, kekerasan Sunni-Syiah berpotensi meluas dan mengancam sendi-sendi persatuan umat dan bangsa Indonesia. Akar konflik Sunni-Syiah sangat kompleks antara lain karena masalah kesenjangan ekonomi, imbas konflik politik di Irak, Syria, dan Yaman, serta persaingan pengaruh politik-keagamaan antara

Iran dengan Arab Saudi di negara-negara Muslim, termasuk di Indonesia. Pertentangan semakin tajam ketika ditarik ke ranah teologis dan sejarah pertumpahan darah di antara pengikut Sunni-Syiah di masa silam.

Untuk mencegah semakin meluasnya konflik antara kelompok Sunni-Syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog intra umat Islam. Dialog dimaksudkan untuk meningkatkan saling memahami persamaan dan perbedaan, komitmen untuk memperkuat persamaan dan menghormati perbedaan, serta membangun kesadaran historis bahwa selain konflik, kaum Sunni dan Syiah memiliki sejarah kohabitasi dan kerjasama yang konstruktif dalam membangun peradaban Islam.

Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk bersikap arif, menghormati semua sahabat dan keluarga Nabi Muhammad dengan tetap memegang teguh kemurnian akidah sehingga tidak terjebak pada pengkultusan individu. Sebagai kekuatan Muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia harus tampil sebagai penengah dan inisiator dialog. Membawa konflik negara lain ke Indonesia atas dasar sentimen golongan berpotensi merusak persatuan umat dan bangsa serta lebih jauh dapat melemahkan diri di tengah percaturan politik global. Muhammadiyah menghimbau kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil prakarsa dialog di atas prinsip politik bebas aktif dan perjuangan menciptakan perdamaian dunia.

3. Substansialisasi Agama

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan transportasi menciptakan perubahan besar terhadap tradisi, gaya hidup, dan pola keberagamaan dalam masyarakat. Di antara dampaknya adalah mudahnya pengaruh dari tempat lain, baik positif maupun negatif, masuk ke negeri ini hingga ke berbagai daerah terpencil. Tradisi baca, orientasi seksual, model berpakaian, pola komunikasi antara manusia, hubungan

kekeluargaan (kawin-cerai), hedonism, serta interaksi lawan jenis dan tua-muda adalah beberapa contoh dari perubahan sikap yang kadang dipengaruhi oleh arus globalisasi. Keberagaman pada sebagian kalangan cenderung menjadi bagian *lifestyle* dan *performance* daripada kesadaran spiritual.

Muhammadiyah memandang Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) dan filosofi hidup, bukan sekadar gaya hidup. Esensi dari Islam lebih penting daripada *performative*-nya. Esensi dari agama yang substantif antara lain terwujud dalam kesalihan diri dan kesalihan sosial, melakukan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, pemberantasan korupsi, hidup bersahabat dengan umat lain, dan sikap saling tolong-menolong. Karena itu, Muhammadiyah menganjurkan kepada warganya untuk menekankan pentingnya esensi dan substansi Islam, bukan pada unsur *lifestyle* dan *performative*.

4. Meningkatkan Daya Saing Umat Islam

Di dunia Islam, Indonesia sering dibanggakan sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun dalam kancah internasional, peran umat Islam Indonesia masih belum sebanding dengan jumlahnya yang besar. Dalam batas tertentu umat Muslim Indonesia kadang merasa rendah diri di hadapan umat Islam lain, merasa kalah dalam otoritas keagamaan dibandingkan umat dari daratan Arabia, Pakistan, bahkan Malaysia. Dalam organisasi-organisasi Islam tingkat dunia tidak tampil tokoh Muslim Indonesia yang menonjol dan menentukan. Muslim Indonesia seolah *majority with minority mentality* atau *inferiority complex*, sehingga sering mudah menerima pengaruh dari luar dan tidak menjadi subjek yang mempengaruhi.

Sesuai ajaran Islam, Muhammadiyah memandang bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang *'ajam* (luar Arab) dalam hal keimanan, otoritas keagamaan, serta kedudukan dan peran kemanusiaan. Muhammadiyah menganjurkan agar umat Islam Indonesia berperan lebih

aktif di tingkat internasional dan berkompetisi dengan umat Islam lain. Di antara kunci peningkatan peran penting tersebut adalah penguasaan bahasa asing terutama Arab dan Inggris, serta penyebaran khazanah Islam Indonesia ke dunia luar. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila institusi-institusi pendidikan di lingkungan Muhammadiyah meningkatkan kemampuan Bahasa asing bagi warga Muhammadiyah dan menerjemahkan karya-karya keislaman utama dari tokoh-tokoh umat Islam Indonesia ke bahasa asing untuk kemudian mendistribusikannya secara luas.

5. Membangun Budaya Hidup Bersih

Islam adalah agama *fitriah* yaitu agama yang bersih dan mementingkan kebersihan. Dengan ajaran *thaharah*, Islam mendidik pemeluknya untuk senantiasa hidup bersih dan menjaga kebersihan, baik fisik maupun lingkungan. Di antara syarat sahnya shalat adalah suci dari *hadats* serta badan, pakaian, dan tempat dari najis. Islam melarang manusia melakukan *fasad* dan *fakhsya* yaitu berbuat kerusakan di muka bumi antara lain mencemari air, tanah, dan udara. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan menyebarkan berbagai macam penyakit.

Islam sebagai agama *fitriah* dan ajaran Islam tentang *thaharah* belum tercermin dalam kepribadian muslim dan kehidupan masyarakat. Kesan kumuh, kotor dan lusuh masih melekat dengan perilaku umat, rumah tinggal, dan tempat ibadah. Karena itu diperlukan usaha-usaha untuk mengubah budaya masyarakat melalui pendidikan, pengembangan teknologi, dan hukum. Perlu penanaman kesadaran dan budaya hidup bersih sedini mungkin melalui pendidikan keluarga, kelompok bermain, sekolah/madrasah, dan media massa. Dakwah Islam perlu lebih menekankan makna Islam sebagai agama *fitriah* dan aktualisasi ajaran *thaharah* dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual, Muhammadiyah telah menerbitkan buku *Teologi Lingkungan* dan *Fikih Air* sebagai panduan Islam dalam membangun budaya hidup bersih. Kini yang diperlukan adalah memulai gerakan baru berbasis keluarga dan komunitas untuk membangun perilaku hidup dan peradaban bersih. Selain pengetahuan dan kesadaran tentang hidup bersih diperlukan juga teknologi pengolahan limbah dan sampah yang memungkinkan umat melakukan daur ulang air dan sampah serta memanfaatkannya secara produktif untuk pertanian, energi terbarukan, dan industri kreatif berbasis rumah tangga dan komunitas. Usaha membangun budaya hidup bersih dapat diperkuat dengan pemberlakuan penghargaan dan sanksi hukum baik berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya.

B. ISU-ISU KEBANGSAAN

1. Keberagaman Yang Toleran

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dengan ketaatan beribadah dan toleransi yang tinggi. Tradisi toleransi mengakar kuat dalam sikap dan perilaku saling menghormati dan bekerjasama di antara pemeluk agama yang berbeda. Namun akhir-akhir ini terdapat gejala melemahnya budaya toleransi di Indonesia yang ditandai oleh menguatnya ekstrimisme di hampir semua kelompok seperti tindakan penyerangan tempat ibadah dan kekerasan atanama agama yang seringkali terjadi di sejumlah tempat. Selain karena faktor penegakan hukum yang lemah dan kondisi sosial yang rawan, tumbuhnya ekstrimisme keagamaan juga disebabkan oleh mudahnya budaya toleransi.

Oleh karena itu diperlakukan usaha komprehensif dari Pemerintah dan kekuatan masyarakat madani untuk memperkuat budaya toleransi sebagai bagian dari karakter masyarakat Indonesia. Usaha memperkuat toleransi tidak cukup dengan memperbanyak aturan formal yang kaku,

tetapi menyemai dan menumbuhkan kembali nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan agama berbasis keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan formal disertai keteladanan para tokoh agama dan elite bangsa.

2. Melayani dan Memberdayakan Kelompok Difabel

Keberadaan kaum difabel (*difable, different-ability*) merupakan realitas sosial yang serius dengan jumlah sangat besar di Indonesia. Komunitas difabel merupakan kelompok yang memiliki kemampuan berbeda, sebagian karena bawaan sejak lahir dan sebagian lainnya karena masalah kesehatan, usia, kecelakaan, dan sebab-sebab lainnya. Fakta menunjukkan bahwa kaum difabel belum mendapatkan perhatian dan pelayanan yang baik oleh masyarakat dan Pemerintah. Sebagian masyarakat memandang difabilitas sebagai kutukan Tuhan, hukum karma, aib sosial, beban ekonomi, dan pandangan negatif lainnya. Kaum difabel masih mengalami marginalisasi, alienasi, eksklusi, serta tindak kekerasan baik fisik, verbal, sosial, maupun spiritual. Fasilitas pelayanan publik seringkali kurang memperhatikan keadaan dan kebutuhan kaum difabel.

Karena itu diperlukan komitmen dan kepedulian masyarakat dan Pemerintah untuk memperhatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak azasinya sebagai insan Tuhan dan warga negara Indonesia yang mulia. Jaminan konstitusional dan pemenuhannya secara bersungguh-sungguh sangat bermakna bagi kaum difabel terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Ketersediaan fasilitas publik yang mengakomodir kebutuhan kaum difabel dan perilaku sosial yang ramah merupakan keniscayaan agar mereka dapat lebih mandiri, bertanggung jawab, dan tidak menjadi beban sosial. Visi pelayanan terhadap kaum difabel dibangun di atas pandangan positif bahwa Allah Yang Maha Kuasa menciptakan semua manusia dengan sempurna,

mereka memiliki potensi, keunggulan, dan sifat-sifat utama. Pelayanan kaum difabel dikembangkan di atas visi dan sistem pemberdayaan yang memungkinkan mereka mengembangkan dan mengaktualkan kemampuan dirinya serta berkesempatan untuk berbakti dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan secara wajar dan tanpa diskriminasi sebagaimana warga negara lainnya.

3. Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Secara alamiah, Indonesia memiliki gugusan gunung berapi, sungai-sungai besar, tanah dan laut yang luas beserta kandungan kekayaan yang ada di dalamnya. Keindahan dan kekayaan alam Indonesia merupakan rizki Allah dan modal ekonomi yang potensial jika dikelola dengan cerdas, beradab, dan bertanggung jawab sehingga dapat mendatangkan kemakmuran bangsa. Bersamaan dengan itu, keadaan dan potensi alam Indonesia dapat pula mendatangkan musibah alam yang merobohkan bangunan fisik dan merenggut ribuan jiwa sebagaimana dalam peristiwa musibah gunung berapi, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya yang terjadi berkali-kali di negeri ini. Sebagian musibah itu terjadi karena kehendak Allah yang tidak mungkin dicegah oleh manusia, tetapi sebagian besarnya justeru terjadi karena ulah manusia (*man-made disaster*).

Walaupun seringkali terjadi, bangsa Indonesia terlihat gugup dan gagap menghadapi bencana. Selain karena perilaku biadab terhadap alam, bencana alam juga terjadi karena pandangan yang keliru terhadap alam, teologi bencana yang fatalistis, minimnya pemahaman terhadap tabiat dan perilaku alam, serta rendahnya kesadaran dan ketahanan bencana. Sesuai kondisi alamnya, Indonesia seharusnya tanggap, tangguh, dan tangkas menghadapi bencana. Sebagai negara yang akrab dengan bencana, Indonesia seharusnya tampil memimpin dan unggul dalam mitigasi,

penanggulangan, rekonstruksi, dan rehabilitasi bencana. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma kebencanaan ke arah yang lebih positif dan pengembangan sumberdaya manusia yang tangguh didukung teknologi tinggi. Kurikulum pendidikan dikembangkan secara kontekstual sehingga mendekatkan peserta didik dengan lingkungan alam, mental yang kuat, dan keterampilan dasar menghadapi bencana. Muhammadiyah telah menerbitkan buku *Teologi Bencana* serta memiliki Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) dan relawan kemanusiaan yang handal. Muhammadiyah perlu mensosialisasikan Teologi Bencana kepada masyarakat luas serta mengembangkan struktur dan jaringan LPB dan MDMC ke kancah nasional dan internasional sejalan dengan posisinya sebagai kekuatan Civil Society dan Organisasi Dakwah Kemasyarakatan.

4. Membangun Budaya Egalitarian dan Sistem Meritokrasi

Demokratisasi yang berkembang pesat sejak Reformasi 1998 berdampak terhadap keterbukaan dan kebebasan dalam hampir semua bidang kehidupan. Selain melahirkan budaya egalitarian, demokratisasi dalam politik Indonesia saat ini membangkitkan feodalisme baru (neo-feodalisme) dalam bentuk politik dinasti di partai politik dan pemerintahan, elite politik yang berperilaku kebangsawanan, kekuasaan “raja-raja lokal” di daerah, dan dominasi kekuatan ekonomi kapital. Neo-feodalisme juga tumbuh dalam lembaga dan organisasi agama yang melahirkan kultus individu dan relasi parokhial yang ditopang pemahaman dan budaya keberagamaan tradisional-konservatif. Proses demokrasi yang serbaprosedural telah mereduksi esensi berdemokrasi, bersamaan itu tumbuh egoisme elite, kelompok, dan golongan yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan sering kehilangan objektivitas dan prinsip meritokrasi.

Neo-feodalisme dan budaya parokhial merupakan salah satu penghambat kemajuan. Rakyat dan umat di bawah seringkali dirugikan dan dibuat tidak berdaya dalam budaya neofeodal dan parokhial tersebut. Karena itu diperlukan perubahan regulasi politik yang memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas sosial berdasarkan sistem meritokrasi dan budaya egalitarian dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Perlu pembatasan kewenangan politik kepala daerah, kepemilikan aset oleh perseorangan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan peningkatan partisipasi publik dalam berbagai bidang kehidupan. Publik dan institusi-institusi Civil Society perlu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga daerah agar tercegah dari praktik politik dinasti, ajimumpung kelompok, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan golongan.

5. Mengatasi Krisis Air dan Energi

Dunia mengalami krisis air dan energi. Diperkirakan lebih dari dua milyar penduduk dunia kekurangan air. Di Indonesia, krisis air menjadi masalah serius setiap memasuki musim kemarau. Masyarakat mengalami kesulitan air bersih untuk konsumsi air minum dan kebutuhan primer sehari-hari. Krisis air terjadi karena sistem dan pengelolaan teknologi yang buruk, kerusakan alam, rendahnya kesadaran akan krisis air, dan penguasaan akses dan sumberdaya air oleh swasta. Krisis energi terjadi karena menipisnya persediaan minyak bumi, konsumsi transportasi dan industri yang tinggi, serta masalah sistem tata kelola dan tataniaga.

Dalam usaha mengatasi masalah krisis air dan energi serta penyediaannya untuk kepentingan bangsa dan negara Muhammadiyah telah melakukan judicial review Undang-undang Migas dan Undang-undang Sumberdaya Air serta menerbitkan buku *Fikih Air* sebagai panduan teologis pemanfaatan dan konservasi sumberdaya air. Bangsa Indonesia

perlu membangun budaya hemat air dengan mengurangi konsumsi air, mengembangkan teknologi daur ulang air, dan menghentikan komersialisasi air. Guna mengatasi krisis energi, Pemerintah harus segera menerbitkan undang-undang Migas yang pro rakyat, mengembangkan sumber energi alternatif seperti nuklir, panas bumi, matahari, dan sumber energi yang terbarukan. Penguasaan air oleh swasta dan pihak-pihak yang hanya mengutamakan kepentingan sendiri harus dicegah karena bertentangan dengan konstitusi bahwa “bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya hajat hidup orang banyak”. Bersamaan dengan itu diperlukan edukasi publik untuk membangun budaya hemat energi dan air serta kesadaran dan kepedulian dalam mengatasi krisis energi dan air.

6. Memaksimalkan Bonus Demografi

Dalam dua dasa warsa ke depan (2035) Indonesia mendapatkan anugerah kependudukan atau bonus demografi dimana mayoritas penduduk terdiri atas kelompok usia produktif. Bonus demografi memungkinkan Indonesia tumbuh menjadi negara besar dengan produktivitas kerja yang tinggi dan kekuatan ekonomi yang memungkinkan Indonesia memperkuat pengaruhnya di tingkat regional dan internasional.

Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar dapat menjelma menjadi tekanan kependudukan (*demographic pressure*) seiring dengan masih tingginya angka kelahiran bayi, kematian ibu melahirkan dan kematian anak usia dini, penyalahgunaan narkoba, kebiasaan hidup yang tidak sehat, kerusakan lingkungan sosial dan akhlak, serta meningkatnya pengangguran, dan tindak kriminalitas.

Jika masalah-masalah tersebut tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik dan menyeluruh, Indonesia dapat jatuh menjadi negara gagal (*fail state*). Pemerintah

dan seluruh kekuatan bangsa harus lebih bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan akhlak bangsa, terutama generasi muda, melalui pendidikan, pelatihan, memberantas penyalahgunaan narkoba, menindak tegas pelaku kriminal, membangun sarana sosial, dan lingkungan yang sehat. Pemerintah, kekuatan-kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan harus menjadikan momentum bonus demografi untuk melakukan usaha-usaha pencerdasan generasi bangsa dan menjauhkan segala hal yang dapat menimbulkan pembodohan dan pelemahan mentalitas anak bangsa. Dalam hal ini diperlukan penguatan keluarga dan pendidikan agama berbasis keluarga, masjid, dan media massa untuk membangun karakter yang kuat dan kepribadian yang utama.

7. Membangun Masyarakat Ilmu

Salah satu masalah bangsa yang sangat serius adalah rendahnya budaya keilmuan. Hal ini ditandai oleh rendahnya budaya baca, gemar mencari ilmu, produktivitas karya ilmiah, dan kreativitas teknologi. Karena lemahnya budaya ilmiah, bangsa Indonesia tidak mampu mengeksplorasi kekayaan alam semaksimal mungkin, membangun keadaban publik, melahirkan produk budaya yang unggul, dan menggunakan teknologi secara produktif. Kelemahan dalam budaya keilmuan juga menyebabkan sebagian warga bangsa sering bertindak tidak rasional, primordian yang sempit, dan beragam perilaku klenik atau mistis yang mematikan akal sehat. Padahal sebuah bangsa tidak akan maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain jika tidak menguasai ilmu pengetahuan dan budaya keilmuan yang tinggi.

Bangsa Indonesia perlu membangun keunggulan dengan mengembangkan masyarakat ilmiah melalui budaya baca, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif. Keluarga dapat dijadikan institusi dini yang sangat

efektif untuk mengembangkan budaya keilmuan. Pemerintah dan masyarakat hendaknya menghapuskan praktik hidup mistis dan irrasional yang menghambat kemajuan dengan mendorong pengembangan ekonomi berbasis ilmu (*knowledge-based economy*), dan masyarakat ilmiah berbasis pendidikan holistic yang mencerahkan. Pemerintah juga harus memperbanyak fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat mengakses pendidikan dan memperluas budaya keilmuan antara lain berupa perpustakaan publik di seluruh pelosok tanah air, dengan memanfaatkan anggaran pendidikan nasional yang cukup besar. Muhammadiyah dan segenap komponen umat Islam harus berada di garis depan dalam mengembangkan budaya keilmuan agar menjadi kekuatan strategis dalam dinamika kehidupan kebangsaan.

8. Menyelamatkan Negara Dengan Jihad Konstitusi

Sebagai pelaksanaan amanat Mukhtamar Muhammadiyah ke-46, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan organisasi masyarakat madani dan para tokoh bangsa telah melakukan *judicial review* sejumlah undang-undang yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat Indonesia dan mengancam kedaulatan negara. *Judicial review* dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai tanggungjawab kebangsaan untuk menegakkan kedaulatan negara, dan tercapainya cita-cita nasional kemerdekaan. Banyaknya produk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 terjadi karena kualitas legislator yang rendah, jual beli hukum (*law buying*) dengan pengusaha dan penguasa asing oleh para komprador, dan lobi-lobi kelompok kepentingan. Langkah strategis tersebut bagi Muhammadiyah merupakan wujud Jihad Konstitusi untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan.

Karena itu, Muhammadiyah bersama-sama dengan kekuatan masyarakat madani perlu lebih menekankan peran

konstitusional dan *judicial*. Peran ini dapat dilakukan dengan mendukung dan mempromosikan kader-kader terbaik bangsa untuk berperan dalam bidang hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsmen, dan sebagainya. Muhammadiyah perlu lebih aktif memberikan masukan dan mengambil prakarsa dalam proses *legal drafting* yang mendukung kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyusun undang-undang yang berkualitas, berpihak pada kepentingan rakyat, dan memajukan kesejahteraan umum, bangsa dan negara.

C. ISU-ISU KEMANUSIAAN UNIVERSAL

1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim (*climate change*) sebagai dampak dari pemanasan global (*global warming*). Tingginya polusi, banyaknya rumah kaca, dan kerusakan hutan telah menimbulkan kerusakan lapisan ozon yang berkontribusi besar dalam proses kerusakan dan pengrusakan alam. Perubahan iklim dapat mengakibatkan gagal panen, bencana kekeringan yang mengancam ketahanan pangan dunia. Perubahan iklim dapat menimbulkan krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan dan krisis politik. Pemanasan global dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut yang menimbulkan banjir abadi yang merusak struktur air tanah, kepunahan ekosistem dan makhluk hidup, serta menenggelamkan pulau-pulau kecil. Beberapa negara kepulauan terancam tenggelam dan kehilangan pulau-pulau di perbatasan. Berubahnya peta dunia dan hilangnya sebagian wilayah territorial negara dapat menimbulkan krisis politik dunia, terutama yang terkait langsung dengan kedaulatan wilayah negara.

Karena itu diperlukan aksi nyata secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pemanasan global melalui usaha-usaha penghijauan hutan, merubah gaya hidup yang boros energi, membersihkan polusi, membangun infrastruktur fisik yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas dengan penghematan, daur ulang, dan meminimalkan penggunaan kertas melalui budaya *paperless* dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan email dan media sosial untuk komunikasi antar manusia, pengembangan *e-book*, *e-news papers*, *e-magazine* dan *website* untuk referensi ilmiah dan pengetahuan mutakhir.

2. Perlindungan Kelompok Minoritas

Berbagai peristiwa diskriminasi terhadap minoritas terjadi di berbagai belahan dunia. Kelompok minoritas etnis, agama, ras dan budaya seringkali mendapat tekanan, intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan oleh kelompok mayoritas. dari kelompok mayoritas. Minoritas tidak hanya dalam bidang agama, tapi juga kelompok yang termarginalkan atau menjadi sub-ordinasi secara sosial seperti para buruh, gelandangan, kelompok *difable*, dan sebagainya. Berbagai perilaku negatif seperti rasisme, bahkan pembersihan etnis masih terus terjadi di beberapa negara.

Jika diskriminasi dari mayoritas terhadap minoritas ini tidak dihentikan, maka dunia akan terus dipenuhi dengan kekerasan. Ketika yang minoritas menjadi kelompok besar, maka mereka akan bergantian menindas yang kecil. Maka mata rantai diskriminasi ini harus diputus. Muhammadiyah memandang bahwa *ukhuwah insaniyah* sebagaimana terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang etnis, agama, dan unsur primordial lain sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam merupakan rahmat bagi semesta alam. Berpijak pada Sunnah Nabi,

Muhamadiyah juga memandang bahwa golongan yang besar atau mayoritas harus selalu melindungi dan menyayangi yang kecil dan minoritas. Demikian pula sebaliknya, kelompok yang kecil atau minoritas harus menghormati yang besar dan mayoritas. Karena itu, Muhammadiyah menganjurkan kepada seluruh institusi yang ada dibawahnya untuk selalu menjadi pelindung terhadap kelompok minoritas yang tertindas.

3. Eksistensi Manusia di Bumi

Dunia saat ini menghadapi persoalan yang berkaitan dengan eksistensi manusia dalam kehidupannya. Hal ini terkait dengan ledakan penduduk, keterbatasan sumber daya alam, serta ancaman musnahnya manusia akibat penggunaan senjata nuklir, konflik dan pemusnahan etnik, maupun perubahan iklim yang ekstrem. Mengingat kembali pada kasus Perang Dunia Kedua, kadang tidak ada paralelisme antara modernitas dengan kemanusiaan, antara kemajuan teknologi dengan sifat luhur kemanusiaan. Holocaust sebagai peristiwa sangat mengerikan pada abad ke-20 justru terjadi pada negara Jerman yang saat itu menjadi salah satu pusat dari perkembangan teknologi. Jerman sebagai salah satu negara paling maju di dunia terbawa dalam rasisme dan melakukan pembunuhan massal. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran bahwa kemajuan teknologi, seperti produksi robotik maupun persenjataan nuklir dapat menjadi penyebab kehancuran manusia itu sendiri.

Oleh karena itu diperlukan etika kemanusiaan global berbasis agama yang menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang utama seperti orientasi hidup saling kasih sayang, damai, toleran, tengahan, serta keshalehan dan akhlaq mulia agar manusia modern dan berteknologi tinggi tidak menjadi insan modular yang buas dan matirasa fitrah kemanusiaannya. Pendidikan dan relasi antarbangsa harus menjadi media untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang autentik itu sehingga dapat mencegah alienasi dan pemusnahan manusia

selaku insan Tuhan yang mulia.

4. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi

Dunia sudah memasuki era digital sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Manusia yang secara fisik terpisahkan oleh jarak geografis senantiasa terkoneksi satu dengan yang lain secara cepat. Informasi di suatu tempat tersebar ke seluruh pelosok penjuru dunia. Meskipun demikian, interaksi fisik antara sesama manusia menjadi sangat terbatas. Berbagai komunitas media sosial mampu mendekatkan manusia dalam dunia maya, tetapi mereka jauh antara satu dengan lainnya dalam dunia nyata.

Teknologi informasi sebagaimana teknologi lainnya memiliki manfaat dan *madlarat* bagi pemakainya. Umat Islam mutlak menguasai teknologi informasi, tidak sekedar menjadi pengguna yang pasif. Kemampuan menguasai teknologi akan bermanfaat untuk sarana dakwah dan penyebarluasan faham dan gagasan yang utama. Jejaring antar manusia dapat dikembangkan menjadi jejaring ideologi, advokasi dan kerjasama yang membuana. Perlu dikembangkan etika virtual yang menjunjung tinggi kesopanan, penghargaan terhadap sesama, dan akhlaq mulia sehingga relasi media sosial tidak liar dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

5. Mengatasi Masalah Pengungsi

Peperangan yang terjadi di beberapa kawasan telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat yang tidak berdosa. Ribuan manusia meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampung halamannya. Banyak di antara mereka adalah umat Islam yang berasal dari Irak, Syria, Yaman, Myanmar, Somalia, Eritria dan sebagainya. Persoalan pengungsi ini semakin kompleks di tengah krisis ekonomi. Banyak negara yang menolak dan mengusir para pengungsi dari tanah air mereka.

Karena itu, terkait dengan penanganan masalah pengungsi ini Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga kemanusiaan tingkat dunia perlu mengambil langkah cepat untuk menekan negara-negara anggota PBB memberikan pelayanan dan perlindungan bagi para pengungsi. PBB dan negara-negara adidaya tidak boleh terjebak pada sikap politik standar ganda dalam menghadapi negara-negara pelanggar hak asasi manusia. Harus ada peraturan yang menjamin pemenuhan hak-hak dan perlindungan para pengungsi sehingga mereka terbebas dari eksploitas dan perbudakan manusia. Perlu ada sanksi tegas bagi Pemerintah yang melanggar Hak Azasi Manusia dan perdagangan manusia.